



Menteri  
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
Transmigrasi  
Republik Indonesia

## **SAMBUTAN PEMBUKAAN**

**RAPAT KOORDINASI PKKPM PUSAT  
DAN DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2015**

**Di Hotel Mercure  
Jakarta, 11 Agustus 2015**

**Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi  
Wabarakaatuh.**

Bapak / Ibu yang saya hormati,

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam perspektif program-program unggulan Presiden Republik Indonesia sesungguhnya memegang peranan yang sangat penting, dimana program “Nawacita” Presiden terdapat beberapa poin yang terkait yaitu :

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Dalam peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 12 tahun 2015 pasal 2 dinyatakan bahwa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi membantu Presiden dengan tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Penjabaran tugas kementerian pada Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan diantaranya adalah *pelaksanaan kebijakan* di bidang perencanaan *pembangunan kawasan*

*perdesaan, pembangunansarana/prasarana kawasan perdesaan, dan pembangunan ekonomi kawasan perdesaan.*

Bapak / Ibu yang saya hormati,

Pembangunan masyarakat desa adalah sesuatu yang sangat strategis dalam pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin pada September 2014 mencapai 27,73 juta orang atau 10,96 persen sebagaimana Berita Resmi Statistik BPS No.06/01/Th.XVIII, tanggal 2

Januari 2015, yang bertajuk Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2014.

Selama periode Maret 2014 – September 2014, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,51 juta orang pada Maret 2014 menjadi 10,36 juta orang pada September 2014. Sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 0,40 juta orang (dari 17,77 juta orang pada Maret 2014 menjadi 17,37 juta orang pada September 2014.

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2014 sebesar 8,34

persen, turun menjadi 8,16 persen pada September 2014. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan turun dari 14,17 persen pada Maret 2014, menjadi 13,76 persen pada September 2014.

Perlu digarisbawahi bahwa Penurunan ini terjadi sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada Nopember 2014.

Kita harus bekerja keras mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan khususnya Rumah Tangga Miskin melalui strategi penanggulangan kemiskinan yang meliputi :

1. Pengembangan sistem perlindungan sosial yang menyeluruh dan terintegrasi;
2. Pemenuhan pelayanan dasar bagi penduduk miskin dan rentan;
3. Pengembangan penghidupan secara berkelanjutan (sustainable livelihood) bagi masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai kebijakan dan dukungan di tingkat lokal, regional, dan nasional dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Strategi-strategi tersebut sejalan dengan kebijakan Kemendes, PDT dan Transmigrasi

diantaranya memprioritaskan Pembangunan Desa yang meliputi :

- Pelayanan / pemenuhan kebutuhan dasar Desa
- Sarana dan prasarana Desa
- Pengembangan ekonomi lokal Desa
- Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

Diantara penjabaran strategi dan kebijakan pengentasan kemiskinan masyarakat di kawasan perdesaan dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan dalam bentuk PROGRAM

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PKKPM).

Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) hadir untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kehidupan secara berkelanjutan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan agar lebih menjamin peningkatan taraf hidup keluarga miskin secara layak dan berkesinambungan.

Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) merupakan *program unggulan* KEMENDES dengan alasan-alasan :

1. Treatment program adalah by name by address masyarakat miskin berdasarkan indeks kemiskinan wilayah (IKW). Dengan demikian pemanfaat sasaran sangat jelas individu-individunya dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mendorong peran aktif pemerintah daerah dan memperkuat koordinasi lintas pemangku kepentingan yang

terkait dalam kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan.

3. Lokasi kegiatan menyebar di seluruh Indonesia (102 kabupaten 183 kecamatan).

Bapak/ibu Hadirin yang saya hormati,

Sekarang sudah memasuki bulan Agustus, Tahun 2015 mempunyai sisa waktu kurang dari 5 bulan oleh karena itu kita semua wajib bahu membahu merealisasikan target implementasi progres kegiatan program di lapangan *agar masyarakat kelompok sasaran tidak terlalu lama menunggu* dan

*sekaligus kegiatan ekonomi yang direncanakan agar segera berjalan untuk peningkatan kesejahteraan mereka.*

Meskipun demikian saya pesankan agar setiap kegiatan dilakukan sesuai dengan ketentuan program dan aturan perundangan yang berlaku untuk menjamin akuntabilitas program.

Manfaat program untuk jangka panjang kiranya perlu terus dilakukan evaluasi apakah treatment / intervensi program berhasil meningkatkan kapasitas ekonomi penerima manfaat. Pendampingan

masyarakat secara berkelanjutan menjadi kebutuhan agar penghidupan yang berkelanjutan sebagaimana yang direncanakan nyata-nyata bisa direalisasikan.

Peran Pemerintah Daerah sangat penting terhadap keberhasilan Program Peningkatan Kesejahteraan Keluarga melalui Pemberdayaan Masyarakat (PKKPM) di lapangan, untuk itu agar diperkuat koordinasi pelaksanaan kegiatan dan dukungan terhadap program sesuai kebutuhan program antara lain identifikasi pengenalan potensi kewilayahan, optimalisasi peran Balai

Latihan Kerja (BLK), dan dukungan APBD dalam melengkapi kebutuhan program.

Demikian sambutan ini, Pada akhirnya saya mengucapkan selamat melakukan rakor pelaksanaan PKKPM Pusat dan daerah semoga dapat menghasilkan output yang optimal bermanfaat untuk masyarakat dan berhasil meningkatkan kinerja program di Kemendes.

Terima kasih

*Wassala mu'alaikum wa rahmatullahi wa barokatuh.*

Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi

**Marwan Jafar**